

**EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Disusun Oleh:

RINA HAPSARI (1811001004)

IRFAN BASTIAN (1811001007)

SIBTI ILAHI (1811001019)

RIZKY MELLIANA DEVI (1811001024)

**PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS EKONOMI, ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS 'AISYIAH YOGYAKARTA
TAHUN AJARAN 2020/2021**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah.....
- B. Rumusan Masalah.....
- C. Tujuan Penelitian.....
- D. Manfaat Penelitian.....

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

- A. Tinjauan Pustaka.....
- B. Kerangka Teori.....

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian.....
- B. Lokasi Penelitian.....
- C. Narasumber.....
- D. Teknik pengumpulan data.....
- E. Teknik Analisis Data.....

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Pembahasan dan Analisis Data.....
- B. Evaluasi.....

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....
- B. Saran.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas penelitian yang berjudul Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Di DIY ini tepat pada waktunya. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Adapun tujuan dari penulisan laporan penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik, selain itu laporan penelitian ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang Penanggulangan Kemiskinan bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi pengetahuannya sehingga kami bisa menyelesaikan laporan penelitian ini, kami menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran akan kami nantikan demi kesempurnaan penelitian ini.

Yogyakarta, 15 April 2021

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

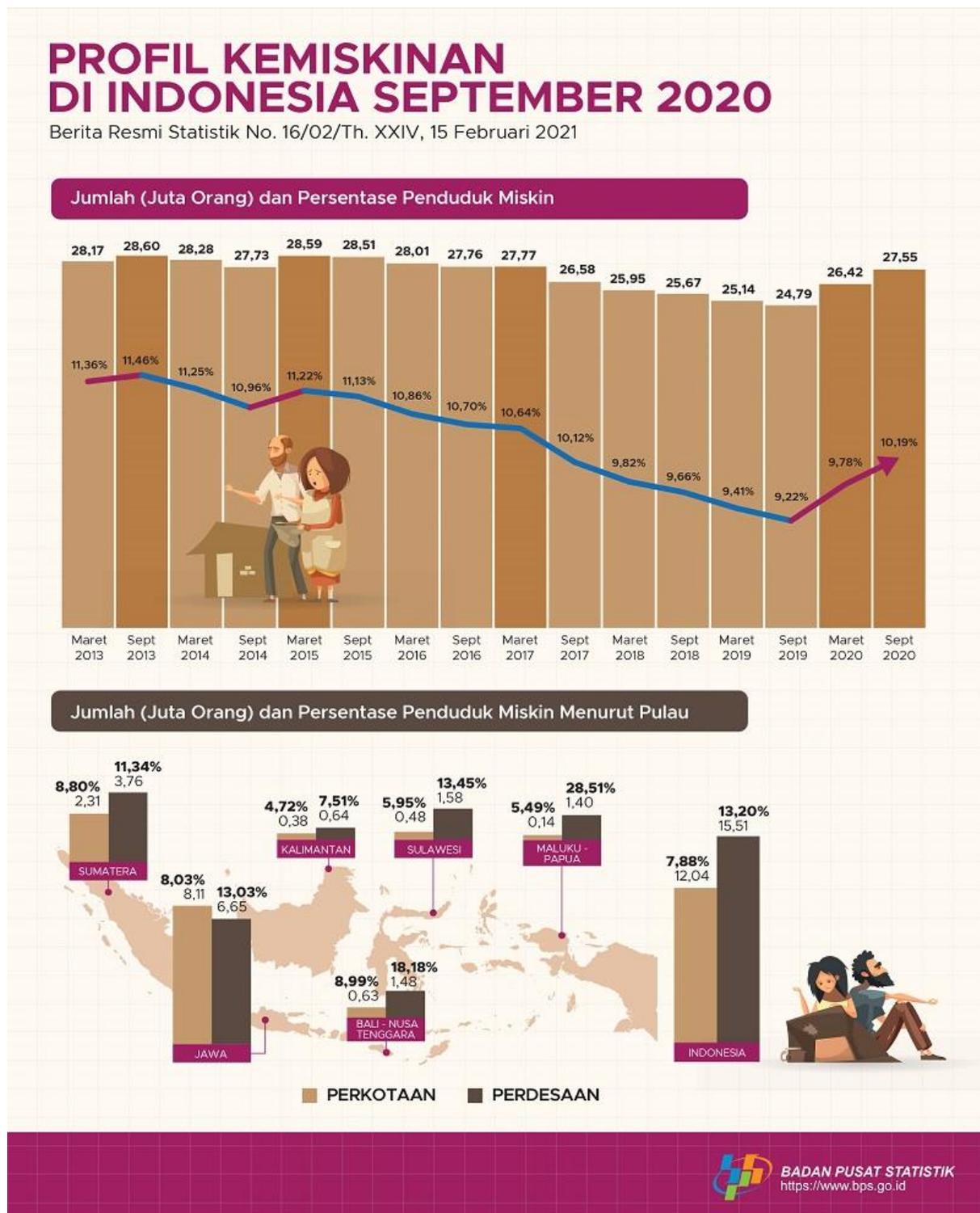
Isu kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang memprihatinkan, sebagian orang merasakan dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang harus diatasi setiap daerah. Persoalan kemiskinan bukan hanya terkait dengan masalah ekonomi, namun juga terkait dengan bidang lain yang sifatnya multidimensi. Sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka kemiskinan adalah masalah yang harus diatasi. Kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan sudah seharusnya didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan tersebut.

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan, tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Pemerintah masih mengalami kesulitan dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Kesulitan dalam mengentaskan kemiskinan dikarenakan kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan selama ini hanya dilihat dalam satu dimensi saja. Sumber data yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan secara makro berasal dari Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (Ras, 2013:57). Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Meskipun pemerintah telah banyak melaksanakan program untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi. Dalam memahami masalah kemiskinan di Indonesia, perlu diperhatikan lokalitas yang ada di masing-masing daerah, yakni kemiskinan pada tingkat lokal ditentukan oleh komunitas dan pemerintahan setempat.

Angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data terkait kemiskinan di Indonesia, berdasarkan Survei Ekonomi Nasional September 2020 jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019. Namun jika dilihat dari persentase penduduk miskin di daerah Yogyakarta Tingkat kemiskinan di DIY merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa sehingga menggelisahkan berbagai pihak dan kemiskinan perkotaan menyumbang angka yang sangat signifikan, yaitu 66% dari keseluruhan penduduk miskin di DIY.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Pada September 2020



Sumber: BPS, Survei Ekonomi Nasional September 2020

Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi September 2020



Sumber: BPS, DIY

Kepala Bappeda DIY Budi Wibowo menjelaskan ada sejumlah persoalan yang dihadapi DIY untuk menurunkan angka kemiskinan. Salah satunya akibat terjadinya *inclusion error* atau kesalahan sasaran penerimaan program. Masyarakat yang sebenarnya tidak masuk kategori miskin, tetapi menerima program. Faktor lainnya adalah *exclusion error*, yaitu kesalahan yang terjadi karena orang yang seharusnya menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan namun kenyataannya malah tidak menerima. Dan juga kondisi tersebut terjadi karena adanya ketidaksesuaian data saat proses pendataan dilakukan atau tidak ada updating (pembaruan) data terkini. Kondisi masyarakat yang berubah status, yang sebelumnya miskin menjadi tidak miskin, atau sebaliknya. Ketidaksesuaian data juga diakibatkan tidak maksimalnya proses verifikasi dan validasi (verivali).

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat susah untuk diatasi yang dimana keadaan seseorang hidup dalam garis kemiskinan pada umumnya kurangnya pendidikan, dan pengangguran yang semakin meningkat. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya cara untuk melakukan program pembangunan untuk menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah yang belum bisa di atasi salah satunya Provinsi D.I. Yogyakarta, hingga saat ini kemiskinan di D.I. Yogyakarta belum menunjukkan perubahan yang baik. Oleh karena itu kemiskinan masih menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, RPJM DIY menargetkan penurunan kemiskinan menjadi 7% di tahun 2022 dari level 13% yang ada saat ini. Jika dibandingkan dengan RPJMD masing-masing Kabupaten/ Kota, maka target tersebut jauh lebih rendah.

RPJMD Kota Yogyakarta yang targetnya paling rendah, mematok angka yang hampir sama dengan DIY. Hal ini tentu membutuhkan kerja lebih keras semua pihak untuk memenuhinya.

Pemerintah adalah pihak yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk mencari jalan keluar dan memecahkan rumus – rumusan kemiskinan yang ada di daerah tersebut. Apabila pemerintah tidak dapat mengatasi permasalahan kemiskinan dengan baik dan cepat maka akan berdampak buruk dalam perekonomian di D.I.Yogyakarta. Salah satu menanggulangi kemiskinan dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam suatu pembangunan ekonomi yang baik. Dikarenakan manusia merupakan suatu kekayaan dunia yang tiada habisnya, manusia memiliki kontribusi sebagai faktor produksi yang sangat penting dalam perekonomian.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Penyebab Terjadinya Kemiskinan di DIY?
2. Bagaimana Strategi Penanggulangan Kemiskinan di DIY?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kemiskinan di DIY
2. Untuk mengetahui strategi penanggulangan kemiskinan di DIY

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Bappeda DIY
 - a. Agar informasi tentang program penanggulangan kemiskinan di DIY dapat berkembang luas dan diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia terutama yang memerlukan informasi tersebut.
2. Bagi Mahasiswa
 - a. Merupakan tugas praktikum pada mata kuliah Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik yang wajib diselesaikan.
 - b. Untuk bisa memahami dan mengetahui lebih detail lagi terkait program penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia terutama yang ada di DIY.
 - c. Meningkatkan pengetahuan dalam praktik penelitian.
3. Bagi Masyarakat
 - a. Menjadi informasi yang perlu diketahui dan dipahami untuk selanjutnya bisa turut serta membantu pemerintah dalam menangani kasus kemiskinan tersebut .
 - b. Mengetahui kinerja pemerintah di bidang ini apakah berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Khurri Niswati (2014) melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2011. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat analisis panel data. Pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi model regresi data panel adalah dengan menggunakan fixed effect model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di 5 kabupaten/kota provinsi DIY, sedangkan variabel kesehatan dan produktivitas tenaga kerja berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan di DIY dan UMK berpengaruh secara positif terhadap kemiskinan di Provinsi DIY. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti di 5 kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan variabel pendidikan dan kesehatan dan sama-sama menggunakan model Fixed Effect. Perbedaan dalam penelitian ini adalah jangka waktu yang digunakan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Adit Agus Prasetyo (2010) dalam skripsi dengan judul “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data dengan pendekatan efek tetap (*fixed effect model*), dan menggunakan jenis data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 42 variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Adit Agus Prasetyo yaitu sama-sama menggunakan *fixed effect model*. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel upah minimum dan tingkat pengangguran.

Penelitian yang dilakukan oleh Restu Ratri Astuti (2015) dengan judul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2004 – 2012”. Analisis data diolah dengan menggunakan analisis data panel dengan model *regresi random effect*. Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari persamaan regresi dan nilai koefisien determinan (R^2). Hasil penelitian dengan taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk, pendidikan dan kesehatan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin periode 2004 – 2012. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terdapat pada subjek, waktu, dan tempat penelitian

B. Kerangka Teori

a. Kemiskinan

Kemiskinan menurut Bank Dunia didefinisikan sebagai ketidakmampuan penduduk yang bersangkutan untuk mencapai atau memenuhi standar hidup minimum tertentu. Ketidakmampuan seseorang atau penduduk di dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor penyebabnya. Dilihat dari aspek penyebab kemiskinan, maka kemiskinan itu sendiri penyebabnya selain bersifat alamiah dan kultural juga dapat bersifat struktural. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global, sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, pemahaman utamanya mencakup gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi, gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Kemiskinan dapat di lihat dari 2 sisi yaitu kemiskinan absolut di mana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup garis kemiskinan tertentu.

Kemiskinan secara absolut di tentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kedua kemiskinan relatif yaitu pangsa pendapatan nasional yang di terima oleh masing-masing golongan pendapatan. Kemiskinan relatif di tentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang di tetapkan masyarakat setempat. Kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan. Kemiskinan absolut adalah kondisi di bawah pendapatan yang menjamin kebutuhan dasar pangan, pakaian, dan perlindungan. Kemiskinan absolut adalah kondisi kemiskinan yang terburuk yang diukur dari tingkat kemampuan keluarga untuk membiayai kebutuhan yang paling minimal untuk dapat hidup sesuai dengan martabat hidup sesuai dengan martabat kemanusiaan.

b. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi. Penanggulangan merupakan sebuah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan represif. Sekaligus berupaya untuk memperbaiki suatu kondisi lingkungan sosial maupun kebijakan yang sudah tidak sesuai. Jadi, Penanggulangan merupakan suatu upaya pencegahan

yang berguna untuk meminimalisir dan serta mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.

c. Strategi

Strategi adalah rencana yang di satukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan atau organisasi dengan tantangan lingkungan dan di rancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat di capai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Dimana sebuah organisasi atau perusahaan harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang dari dalam maupun dari luar. Menurut Rangkuti (2013:183), berpendapat bahwa strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah di tetapkan berdasarkan misi yang telah di tetapkan sebelumnya. Dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Menurut Grant (1999:21) strategi memiliki 3 peranan penting dalam mengisi tujuan, yaitu :

1. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses. Strategi merupakan suatu bentuk atau tema yang memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi.
2. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi salah satu peranan penting sarana koordinasi dan komunikasi adalah untuk strategi sebagai memberikan kesamaan arah bagi perusahaan.
3. Strategi sebagai target, konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk menentukan di mana perusahaan berada dalam masa yang akan datang.

Dengan menerapkan strategi, kita mengetahui apa yang diharapkan serta kemana arah dan tujuan sebuah kebijakan, sehingga kita dapat menggunakan untuk mempertimbangkan berbagai alternatif terbaik serta dapat mengurangi hambatan-hambatan yang ada. Strategi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting, dimana tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar. Strategi dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilaksanakan perusahaan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer (Dosen pendidikan, 2020).

Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Menurut Kirk dan Miller, mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 4 kabupaten, 1 kota, 78 kapanewon/kemantren, 46 kelurahan dan 392 kalurahan.

C. Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Namun, karena adanya kendala dalam penelitian ini yang mengharuskan peneliti mencari data dan informasi hanya secara online dengan membaca dan memahami banyak referensi seperti jurnal, makalah dan laporan penelitian yang terdapat di internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan

salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti (Dosen pendidikan, 2020).

Berdasarkan sumber pengambilan data, disini peneliti mengumpulkan data secara online dengan membaca dan memahami banyak referensi mulai dari jurnal, makalah, dan laporan penelitian yang ada di internet dan tidak lupa nantinya untuk mencantumkan sumber-sumber tersebut pada referensi laporan penelitian ini.

E. Teknis Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, inti sari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Disini peneliti menggunakan teknik analisis data dengan reduksi data yaitu suatu hal yang tidak terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstraksikan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo (E Fatmawati, 2013).

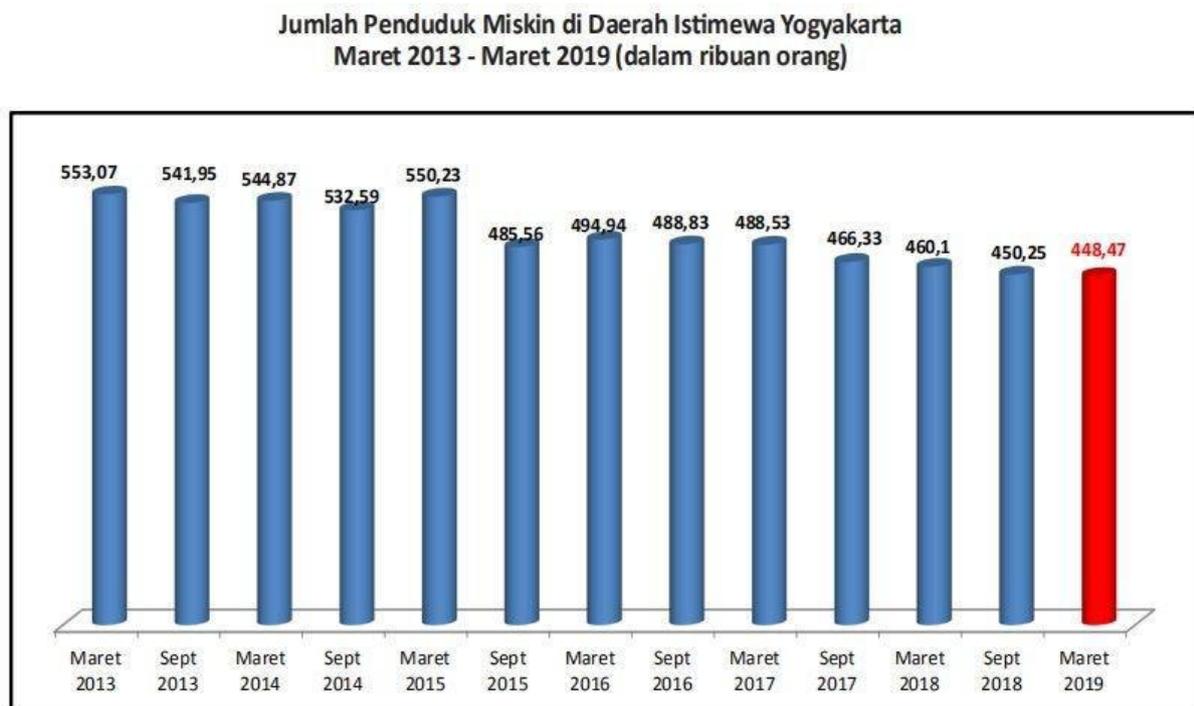
BAB IV PEMBAHASAN

A. Pembahasan dan Analisis Data

4.1. Penyebab Terjadinya Kemiskinan di DIY

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Tabel 3. Jumlah penduduk miskin di DIY Maret 2013- Maret 2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2013- Maret 2019

Dalam lingkup pengertian konvensional, kemiskinan hanya dimaknai sebagai permasalahan pendapatan (*income*) individu, kelompok, komunitas, masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan konsep *United Nation Development Program* (UNDP), bahwa seseorang dikatakan miskin jika tingkat pendapatannya hanya berada di bawah

garis kemiskinan. Oleh karena itu, upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan pada negara dunia ketiga, baik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah kebanyakan hanya bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan. Itu sebabnya, berbagai upaya penanganan kemiskinan itu tidak menyelesaikan masalah dan cenderung gagal.

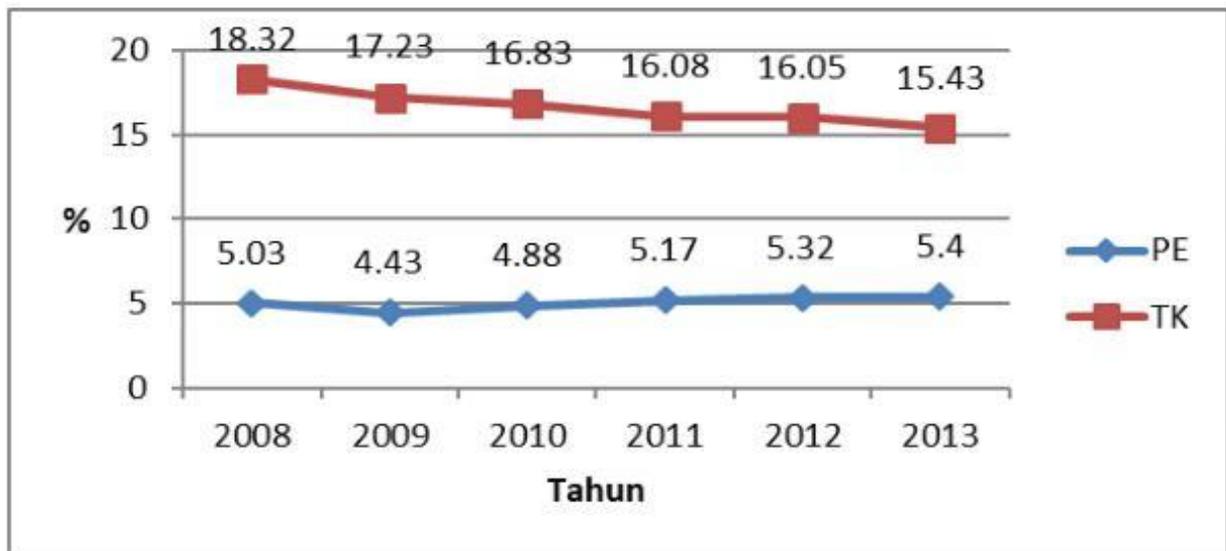
Dalam mengkaji kemiskinan, sedikitnya terdapat 9 dimensi kemiskinan yang perlu dipertimbangkan yaitu: (1) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, dan perumahan), (2) aksesibilitas yang rendah terhadap kebutuhan dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi yang baik, air bersih, dan transportasi), (3) lemahnya kemampuan untuk melakukan akumulasi kapital, (4) rentan terhadap faktor guncangan faktor eksternal yang bersifat individual maupun masal, (5) rendahnya kualitas sumber daya manusia dan penguasaan sumber daya alam, (6) ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, (7) terbatasnya akses terhadap kesempatan kerja secara berkelanjutan, (8) ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental, dan (9) ketidakmampuan secara sosial.

Penyebab kemiskinan di DIY dikarenakan adanya peningkatan pertumbuhan rasio harga beras dan harga dasar gabah (GKG) sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan pertumbuhan jumlah penduduk miskin DIY sebesar 0.06 persen, ceteris paribus. Baik dalam jangka pendek dan jangka panjang pertumbuhan jumlah penduduk miskin DIY terhadap pertumbuhan rasio harga beras dan harga dasar gabah bersifat *inelastic*. Ketika regulasi kekhususan yang berlaku di Provinsi DIY dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diberlakukan, maka pertumbuhan jumlah penduduk miskin di DI Yogyakarta cenderung meningkat sebesar 0.02 persen, ceteris paribus.

Walaupun secara normatif, pemerintah Provinsi DI Yogyakarta telah mengidentifikasi dan mengetahui faktor penyebab utama kemiskinan di DIY, tetapi penurunan angka kemiskinan tidak terlalu signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini antara lain disebabkan kondisi penduduk miskin dari sisi sosial ekonomi sangat sulit untuk keluar dari kemiskinan yang sebagian besar tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mampu melakukan kegiatan usaha produktif karena ketiadaan modal dan faktor produksi lain. Ketidakmampuan ekonomi penduduk miskin diperkuat dengan hasil metode analisis OLS yang menunjukkan bahwa pendapatan per kapita (PDBP) sangat mempengaruhi kemiskinan di DIY. Potensi SDA DI Yogyakarta yang minim sangat mempengaruhi upaya melakukan distribusi pendapatan ke masyarakat. Keterbatasan dana anggaran APBD juga mempengaruhi upaya percepatan kesejahteraan masyarakat di DIY.

Dari sisi jumlah maupun persentase, kemiskinan di DIY dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Meskipun dari tahun ke tahun jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di DIY selalu turun, namun sampai saat ini tingkat kemiskinannya masih lebih tinggi dari nasional. Pada tahun 2013 tingkat kemiskinan DIY sebesar 15,43 persen, lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan nasional sebesar 11,37 persen. Selama empat tahun terakhir (2010 – 2013), penurunan tingkat kemiskinan di DIY melambat. Sementara itu penurunan tingkat kemiskinan secara nasional berlangsung relatif lebih cepat daripada DIY.

Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di DIY



Sumber: Pemda DIY, 2014

Lambatnya penurunan kemiskinan di DIY selain dibayang-bayangi kemungkinan meningkatnya indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan, juga diiringi dengan kecenderungan ketimpangan yang semakin tinggi. Pada tahun 2007, koefisien Gini baru mencapai 0,38, namun pada tahun 2014 sudah mencapai 0,42. Meskipun koefisien Gini tahun 2014 ini lebih rendah daripada tahun 2012 dan 2013, namun dilihat dari kecenderungannya (*trend logarithmic*) semakin meningkat.

Tabel 5. Trend Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di DIY



Sumber: BPS, DIY 2014

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi sektoral, terdapat korelasi negatif antara pertumbuhan sektoral dengan tingkat kemiskinan, kecuali sektor jasa-jasa. Pertumbuhan sektor jasa-jasa memiliki korelasi positif dengan tingkat kemiskinan. Angka korelasi pertumbuhan sektoral sangat rendah. Hanya sektor listrik, gas, dan air bersih dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran saja yang memiliki angka korelasi di atas 0,5. Hasil ini menguatkan bahwa pertumbuhan ekonomi sektoral belum mampu mendorong penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan.

4.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan di DIY

Strategi untuk menanggulangi kemiskinan di DI Yogyakarta, diperlukan upaya yang memadukan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor baik yang berada di pusat maupun daerah. Yang dimana diperlukannya langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang terencana, terpadu dan menyeluruh sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dan masyarakat.

Menurut Huraerah (dalam Nano Prawoto, 2005) menyatakan ada strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan yaitu :

1. Karena kemiskinan bersifat multidimensional, maka program pengentasan kemiskinan seyogyanya juga tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tapi memperhatikan dimensi lain. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan pokok memang perlu mendapat prioritas, namun juga harus mengejar target mengatasi kemiskinan nonekonomi. Strategi pengentasan kemiskinan hendaknya diarahkan untuk mengikis nilai-nilai budaya negatif seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan sebagainya. Apabila budaya ini tidak dihilangkan, kemiskinan ekonomi akan sulit untuk ditanggulangi. Selain itu, langkah pengentasan kemiskinan yang efektif harus pula mengatasi hambatan-hambatan yang sifatnya struktural dan politis.
2. Untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja (*networking*), serta informasi pasar.
3. Melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan.
4. Strategi pemberdayaan, Jadi pengelolaan suatu kelompok masyarakat dengan tujuan perubahan sosial untuk menjadi masyarakat yang lebih berdaya, memiliki kekuasaan juga pengetahuan dan kemampuan untuk dapat menunjang kebutuhan hidupnya lebih baik lagi.
5. Peningkatan akses penduduk miskin pada lembaga ekonomi dan keuangan, yaitu untuk meningkatkan akses pemasaran, dan permodalan usaha ekonomi produktif Rumah Tangga Miskin.

Sedangkan menurut TKKP (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) ada empat strategi yang dikembangkan yaitu :

- Pertama yaitu mengurangi beban masyarakat miskin melalui bantuan Jaminan Kesehatan daerah (Jamkesda), Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) dan Biaya Operasional Sekolah (BOS).
- Strategi kedua, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui beberapa pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi.
- Strategi ketiga, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan UMKM melalui pembinaan yang dilakukan Diperindagkoptan.
- Sedangkan strategi keempat yaitu, melalui sinergi kebijakan dan program secara bersama dengan semua unsur lapisan masyarakat.

Diperlukannya strategi yang memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat, sehingga nantinya akan terjadi perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia. Dan juga program yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Maka dari itu, dalam menyusun strategi penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran. Strategi yang dilakukan dan di upayakan oleh pemerintah DIY meliputi :

1. Strategi Peningkatan Akses Penduduk Miskin Pada Sektor-Sektor Pendidikan, Kesehatan, Keuangan, Dan Infrastruktur.

Ada beberapa program yang dapat dirumuskan, : Penyediaan dan perbaikan layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, Wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, Peningkatan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi bagi penduduk miskin, Peningkatan gizi dan kesehatan keluarga, Pencegahan dan penanggulangan penyakit, Peningkatan akses layanan keuangan, jaringan produksi dan pasar, Pemberdayaan lembaga ekonomi dan keuangan mikro, diversifikasi layanan keuangan mikro (konvensional dan syariah), penyediaan dan perbaikan perumahan dan lingkungan perumahan termasuk air bersih, pembangunan kawasan pedesaan, pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya, peningkatan kesadaran dan penanggulangan bencana alam.

2. Strategi Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi.

Ada beberapa program yang dapat dirumuskan terkait dengan strategi peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, yaitu: peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perlindungan lahan; pengendalian sektor perdagangan, hotel, dan restoran agar lebih berpihak pada usaha penanggulangan kemiskinan; pengendalian harga bahan pokok; perluasan jaringan pelayanan dalam penyediaan kebutuhan pokok dengan melibatkan swasta dan dunia usaha; pembangunan berbasis pedesaan.

Adapun strategi lainnya yang menjadi prioritas pemerintah DIY, yaitu salah satu strategi yang kemudian dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dalam upaya menanggulangi kemiskinan adalah dengan gerakan Gandeng Gendong. Gandeng Gendong dapat diartikan sebagai semangat bersama untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di

lingkungan masyarakat (kampung, kelurahan, kabupaten/kota, provinsi dan negara) cukup pangan, sandang, pekerjaan, papan, pendidikan, kesehatan dan pergaulan sosial. Oleh karena itu upaya yang serius, sinergis dan terpadu dari semua pihak, dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dapat terwujud lebih cepat, mudah dan tepat sasaran.

Gandeng Gendong resmi menjadi program Pemkot Yogyakarta sejak 2018. Gandeng Gendong merupakan kelanjutan dari visi Segoro Amarto Pemerintah Kota Yogyakarta yang diluncurkan pada 2010. Program tersebut merupakan tindakan konkret dari *smart city* dan *smart society*. Dalam program ini ada inovasi, yang menurut Heroe Poerwadi, ditujukan untuk mengoptimalkan potensi kearifan lokal sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Dalam konsep Gandeng Gendong bisa diterapkan di seluruh aspek pembangunan mulai dari pembangunan di bidang ekonomi, pengentasan kemiskinan, hingga pemberdayaan pelaku usaha kecil dan mikro.

Implementasi Gandeng Gendong juga terbukti dapat menciptakan penguatan kelompok usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) kuliner. Penguatan ini adalah hasil sinergi dari melibatkan unsur 5 K, yaitu, Kampung, Kampus, Pemkot, Korporat, dan Komunitas. Kampung sebagai basis pelaksanaan dan pengembangan program, dengan dukungan penguatan SDM pelaku UMKM. Kampus, melalui forum LPPM yang dimiliki. Pemkot, sebagai perumus kebijakan, perencanaan monitoring dan evaluasi, dan pelaksanaan program. Korporasi, dalam penggunaan dan pengembangan produk lokal, promosi, dan fasilitasi (Forum CSR). Komunitas, bentuk konsolidasi inter dan natas komunitas bagi pelaksanaan program sosialisasi. Menurut Agus Salimi dari Bappeda Kota Yogyakarta, menyatakan, bahwa berdasarkan pemetaan masing-masing kampung memiliki potensi dan kekuatan masing-masing. Ada yang lebih kuat potensi dalam hal kesenian, ada juga yang kuat dalam bidang kuliner atau masak memasak. Dengan melaksanakan Gandeng Gendong, maka diharapkan percepatan penanggulangan kemiskinan akan tercapai.

Konsep Gandeng Gendong membawa Pemkot Yogyakarta bersinergi dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder, yang hasilnya dapat dirasakan bersama-sama. Selama tiga tahun terakhir berhasil menekan angka kemiskinannya. Pada 2017 persentase penduduk miskin 7,64 persen, lalu 2018 sebesar 6,98 persen, dan menjadi 6,84 persen pada 2019. Adapun contoh konkret Gandeng Gendong yang dapat dilihat dari transformasi sosial di Kawasan Bendung Lepen Mrican. Kawasan di dekat Sungai Gajah wong yang dulu kumuh itu telah berhasil menata diri menjadi permukiman yang bersih, sehat, dan produktif dengan ruang terbuka yang bisa dijadikan tempat wisata dan taman edukasi. Contoh lainnya, ada di Bausasran yang dikembangkannya sebagai kampung sayur. Menurut hasil survei menunjukkan, terdapat 58 persen stakeholder cukup puas dengan Gandeng Gendong. Tercatat ditahun 2019, terdapat 72 kelompok UMK Kuliner melakukan transaksi melalui jamuan makan dan minum Pemerintah Kota Yogyakarta dengan total transaksi senilai Rp15.940.712.613 atau 38,95 persen dari anggaran jamuan makan dan minum.

B. Evaluasi

Program Gandeng Gendong memfokuskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang perekonomiannya atau pendapatan menengah ke bawah. Hal tersebut di akui oleh salah satu anggota Kelompok Gandeng Gendong. Bahwa sebelum kehadiran program Gandeng Gendong tersebut perekonomian masyarakat Kota Yogyakarta mengalami kesulitan berkembang karena market placenya tidak jelas dan masyarakat belum secara serius diberikan pelatihan *soft skill* dan *hard skill*. Selanjutnya juga diakui oleh Ibu Fitri Sulistyowati bahwa program *collaborative governance* ini memiliki problem tentang pembayaran non tunai karena pencairan anggaran yang lambat dan tidak meratanya pesanan yang diperoleh tiap kelompok. Serta minimnya sosialisasi pelatihan dari pihak korporasi. Selain kendala dari pemerintah, terdapat kendala dari kelompok kuliner yaitu tidak mampu memenuhi pesanan dalam jumlah banyak dan waktu cepat.

Dapat dikatakan bahwa program Gandeng Gendong belum maksimal dalam pelaksanaannya terutama tentang sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan. Sehingga Program Gandeng Gendong dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta tidak banyak memberi dampak yang signifikan terhadap jumlah kemiskinan. Hal tersebut karena pelaksanaan program Gandeng Gendong belum maksimal dalam sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan kepada masyarakat. Evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan di Yogyakarta menghasilkan pengetahuan bahwa berbagai program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kurang berhasil. Hal itu disebabkan kurangnya sinergi pemerintah dan partisipasi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan.

Angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data terkait kemiskinan di Indonesia, berdasarkan Survei Ekonomi Nasional September 2020 jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019. Namun jika dilihat dari persentase penduduk miskin di daerah Yogyakarta Tingkat kemiskinan di DIY merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa sehingga menggelisahkan berbagai pihak dan kemiskinan perkotaan menyumbang angka yang sangat signifikan, yaitu 66% dari keseluruhan penduduk miskin di DIY.

Penyebab kemiskinan di DIY dikarenakan adanya peningkatan pertumbuhan rasio harga beras dan harga dasar gabah (GKG) sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan pertumbuhan jumlah penduduk miskin DIY sebesar 0.06 persen, ceteris paribus. Baik dalam jangka pendek dan jangka panjang pertumbuhan jumlah penduduk miskin DIY terhadap pertumbuhan rasio harga beras dan harga dasar gabah bersifat *inelastic*. Ketika regulasi kekhususan yang berlaku di Provinsi DIY dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diberlakukan, maka pertumbuhan jumlah penduduk miskin di DI Yogyakarta cenderung meningkat sebesar 0.02 persen, ceteris paribus.

Strategi untuk menanggulangi kemiskinan di DI Yogyakarta, diperlukan upaya yang memadukan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor baik yang berada di pusat maupun daerah. Yang dimana diperlukannya langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang terencana, terpadu dan menyeluruh sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dan masyarakat. Diperlukannya strategi yang memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat, sehingga nantinya akan terjadi perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia. Dan juga program yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Maka dari itu, dalam menyusun strategi penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran.

B. Saran

Dalam upaya pengentasan kemiskinan di DIY, Pemerintah DIY perlu menempuh kebijakan antara lain meningkatkan dukungan atau partisipasi dari masyarakat dengan melibatkan secara aktif dan memberikan ruang partisipasi ke dalam proses-proses kebijakan. Karena dukungan dari masyarakat merupakan salah satu syarat yang dibutuhkan oleh pemerintah sekaligus dapat mempengaruhi terhadap program yang sedang dijalankan oleh pemerintahan itu sendiri. Hal yang perlu dilakukan, yaitu:

- Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus, Komunitas dan Kampung perlu ditingkatkan lagi dalam hal upaya monev (monitoring dan evaluasi) karena hal tersebut akan membantu mengidentifikasi mana program yang potensial yang harus dilanjutkan atau program yang harus diganti dengan kebijakan baru. Sosialisasi, pelatihan dan pemberdayaan harus ditingkatkan karena apa yang telah dilakukan oleh para stakeholders (Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus, Komunitas dan Kampung) belum maksimal.
- Dari segi strategi pemerintah perlu memberikan peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan dengan meningkatkan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja, serta edukasi mengenai informasi pasar. Jika memang pemerintah sulit untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin, setidaknya pemerintah lebih gencar lagi dalam memberikan semacam kegiatan pelatihan atau pemberdayaan untuk penduduk miskin agar bisa berdaya dan bisa memiliki usaha produktif dengan modal yang tidak terlalu banyak.
- Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menyusun program atau kebijakan terkait langkah-langkah penanganan dan pendekatan agar bisa terencana dengan baik dan matang, terpadu serta tepat sasaran untuk penanganan kasus kemiskinan di DI Yogyakarta ini, serta pemerintah juga harus lebih mengefektifkan kembali salah satu program untuk mengurangi beban masyarakat miskin yaitu melalui bantuan Jaminan Kesehatan daerah (Jamkesda), Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) dan Biaya Operasional Sekolah (BOS).
- Gandeng Gendong juga perlu mengakomodir UMKM, terutama terkait Kurasi yang dapat dilakukan instansi terkait menggandeng pihak yang berkompeten. Kurasi diperlukan yaitu guna menjamin kualitas produksi agar bisa diterima di pasar yang lebih luas. Adapun pada sektor seni budaya, dapat disinergikan dengan dinas Pariwisata termasuk dengan memberikan kemudahan fasilitas sertifikasi bagi kelompok seni budaya.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.jogjaprov.go.id/berita/detail/7870-wakil-gubernur-diy-paku-alam-x-pimpin-rakor-penanggulangan-kemiskinan>

Salim Agus, 2018. Jurnal Kemiskinan di Perkotaan Yogyakarta dan Signifikansinya dalam Penanggulangan Kemiskinan di DIY

Publika Enersia, 2014. Jurnal Analisis Ketimpangan Ekonomi Pada Bidang Pengurangan Kemiskinan di Bappeda DIY. Vol. 3 No 1

K. Niswati,. 2014. Jurnal Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2011. Ekonomi regional Vol. 9, No.2, September 2014. Universitas Jenderal Soedirman

A.A Prasetyo, 2010. Jurnal Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2003-2007. Semarang: FE Universitas Diponegoro

Astuti, R. R. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2004 – 2012. Yogyakarta : FE UNY

Bank dunia, Michael P.Todaro & Stephen C.Smith, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 220

Kurniawan Dhani, Kemiskinan di Indonesia dan Solusinya

Juliansyah Elis, 2017. Strategi Pengembangan Sumber Daya Perusahaan Dalam Meningkatkan Kinerja PDAM Kabupaten Sukabumi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi

Edi Hamka Muh, 2020. Strategi Pemerintah Dalam Mengendalikan Harga Kebutuhan Pokok di Kota Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar

DosenPendidikan.Com (2014). Penelitian kualitatif, from <https://www.dosenpendidikan.co.id/penelitian-kualitatif/>

DosenPendidikan.Com (2014). Teknik pengumpulan data, from <https://www.dosenpendidikan.co.id/teknik-pengumpulan-data/>

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Metode dan teknik penelitian, from <https://eprints.undip.ac.id/27-bab-III-metode-penelitian/>

Saragih JP, 2016. Jurnal Faktor-faktor penyebab dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menghapus Kemiskinan. Vol. 6 No. 2

http://bappeda.jogjaprov.go.id/karya_perencanaan/detail/58-strategi-penurunan-kemiskinan-terpadu-di-diy

<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/gandeng-gendong-turunkan-kemiskinan>

<https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp/nmj2491>

Sugiyarta, S.H, M.M (2014). Jurnal Strategi Penurunan Kemiskinan Terpadu DIY
http://bappeda.jogjaprovo.go.id/karya_perencanaan/detail/58-strategi-penurunan-kemiskinan-terpadu-di-diy

<https://jogjadaily.com/2019/10/gandeng-gendong-tidak-pernah-sepi-pendaftar/>

<https://menpan.go.id/site/berita-terkini/gandeng-gendong-mengentaskan-kemiskinan-kota-yogyakarta>

<https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.antaranews.com/amp/berita/1181480/pembayaran-telat-kelompok-kuliner-gandeng-gendong-yogyakarta>

Eka Putra- Nova Elsyra- Muchamad Zaenuri, 2020. Tata Kelola Kolaborasi Dalam Penanganan Kemiskinan di Kota Yogyakarta : Program “Gandeng-Gendong”